



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PERAN PENTING OJOL DALAM MENDUKUNG UMKM

**Dian Cahyaningrum**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dian.cahyaningrum@dpr.go.id](mailto:dian.cahyaningrum@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ojek *online* (ojol) berperan penting dalam mendukung aktivitas dan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ojol membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, serta memungkinkan UMKM menjangkau pelanggannya tanpa perlu infrastruktur logistik tersendiri. Ojol juga dapat meningkatkan volume penjualan UMKM melalui kemudahan pemesanan dan kecepatan pengiriman, serta mengoptimalkan layanan tanpa harus memiliki armada sendiri. Ojol telah menjadi roda penggerak vital bagi ekonomi UMKM sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal itu, demo pengemudi ojol secara serentak setidaknya di 14 kota besar pada tanggal 20 Mei 2025, dengan aksinya yaitu "*off bid*" (mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam), telah menimbulkan kerugian pada sektor UMKM dan sektor-sektor lainnya. Ada beberapa tuntutan yang diajukan pengunjuk rasa kepada pemerintah, yaitu mengenakan sanksi kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kepmenhub Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Tuntutan lainnya adalah potongan aplikasi 10 persen dan revisi terhadap tarif penumpang, serta penghapusan beberapa program khusus seperti Hemat, Prioritas, Argo Goceng (Aceng). Mereka juga minta penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang, dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sebagaimana dikemukakan Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, demo mengakibatkan UMKM dan pedagang kuliner yang mengandalkan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood mengalami penurunan pesanan. Sektor logistik skala kecil seperti pengiriman barang dan dokumen mendesak lewat GoSend dan GrabExpress juga terganggu, sementara banyak usaha mikro dan individu yang menggantungkan aktivitas usahanya pada layanan ini. Masyarakat umum juga mengalami kesulitan mobilitas. Di sisi lain, demo pengemudi ojol menimbulkan risiko reputasi dan kerugian langsung bagi perusahaan platform. Sementara dari sisi ekonomi, demo telah menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp188 miliar. Angka tersebut didapat berdasarkan riset dari total *Gross Transaction Value* (GTV) pada industri *ride-hailing* sepanjang tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp135 triliun. Jika diasumsikan perputaran transaksi ini terjadi secara merata sepanjang tahun, maka estimasi perputaran uang harian mencapai sekitar Rp375,89 miliar. Bila terjadi penurunan aktivitas sebesar 50 persen dalam sehari akibat mogok, maka potensi nilai transaksi yang terdampak mencapai sekitar Rp187,95 miliar.

Untuk itu persoalan ojol perlu segera diselesaikan. Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi *online*, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojol serta *merchant* UMKM. Oleh karena itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengimbau isu tarif tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Sebelumnya, Menteri UMKM bahkan telah merekomendasikan pengemudi ojol masuk dalam kategori UMKM. Ada banyak keuntungan jika pengemudi ojol menjadi UMKM, yaitu mendapatkan insentif dari pemerintah, misalnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji. Pengemudi ojol juga mendapatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut juga membuat pengemudi ojol mempunyai “payung hukum” atas pekerjaannya. Namun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak ojol dikategorikan UMKM dan menghendaki menjadi pekerja tetap sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara aplikator keberatan dengan perubahan status mitra menjadi pekerja tetap karena meniadakan fleksibilitas.

Sebagai upaya memperkuat posisi pengemudi ojol dalam ekosistem digital, Menteri UMKM kemudian menggagas pembentukan koperasi kemitraan di setiap aplikator. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi kolektif yang mampu menyediakan layanan simpan pinjam, pengadaan atribut kerja seperti jaket dan helm, hingga usaha produktif lainnya. Pembentukan koperasi kemitraan tersebut juga sejalan dengan gagasan Koperasi Merah Putih yang sedang digalakkan pemerintah. Pendirian koperasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk menjamin kesejahteraan pengemudi ojol secara lebih holistik dan berkelanjutan.

## Atensi DPR

Ojek *online* (ojol) memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan kelangsungan UMKM. Tidak sedikit UMKM yang berkembang karena keberadaan ojol, yang memudahkan pengiriman barang, menjangkau pelanggan lebih luas, dan mengoptimalkan layanan tanpa harus memiliki armada sendiri. Untuk itu, stabilitas dan kondusivitas industri transportasi *online*, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojol, serta *merchant* UMKM harus dijaga. Oleh karena itu, persoalan ojol dengan aplikator perlu segera diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI perlu meminta kepada Menteri UMKM untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau meminimalisasi kerugian UMKM jika terjadi demo. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta kepada Menteri UMKM untuk mengkaji dan menjajaki gagasannya untuk membentuk Koperasi Kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta kepada Menteri UMKM meningkatkan literasi digital UMKM agar dapat memanfaatkan ojol dan melakukan transaksi secara *online* sehingga usahanya berkembang dengan baik.

## Sumber

ekonomi.bisnis.com, 25 April 2025;  
kompas.com, 20 Mei 2025;  
news.detik.com; 21 Mei 2025;  
tempo.co, 25 April 2025;

tempo.co, 20 Mei 2025;  
tribunnews.com, 20 Mei 2025;  
ukmindonesia.id, 21 Mei 2025; dan  
wartakota.tribunnews.com, 22 Mei 2025.



## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Uly Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making